

BAB I

Latar Belakang

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan sampah sebagai segala sesuatu yang berasal dari aktivitas manusia dan tidak terjadi secara alamiah, melainkan dibuang, tidak disukai, atau tidak digunakan (Chandra, 2007). Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat (RI 2008). Sampah didefinisikan sebagai barang yang oleh pemilik atau pengguna sebelumnya dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang, namun bagi individu tertentu, dengan teknik pengelolaan yang tepat, barang tersebut masih dapat dimanfaatkan (Nugroho 2013). Salah satu masalah yang paling sering dihadapi masyarakat dunia adalah sampah.

Sampah adalah produk sampingan dari semua aktivitas manusia. Sebuah kota harus menanggung lebih banyak beban seiring dengan perkembangannya. Salah satunya adalah beban yang ditanggung oleh masyarakat kota secara keseluruhan akibat sampah yang mereka hasilkan. Jika sampah tidak ditangani dengan hati-hati dan serius, sampah dapat memberikan dampak negatif yang besar bagi kota-kota besar. Hal ini dapat menyebabkan perubahan yang tidak diharapkan atau tidak menguntungkan dalam keseimbangan lingkungan, yang dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, harus berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Adalah tugas masing-masing pihak untuk mengelola sampah dengan cara yang dapat mencegah timbulnya masalah (Gunawan, 2007). Pengelolaan sampah merupakan isu yang sangat penting. Mengingat

dampaknya terhadap begitu banyak aspek kehidupan, sampah benar-benar dapat dianggap sebagai masalah budaya (Sudradjat, 2006).

Hampir setiap negara di dunia berjuang dengan sampah, tidak hanya di negara-negara terbelakang tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia sendiri, sampah merupakan masalah yang terus menerus terjadi. Kota-kota besar di Indonesia rata-rata menghasilkan puluhan ribu ton sampah per hari, baik sampah organik maupun anorganik. Truk-truk khusus mengangkut sampah, yang kemudian dibuang atau ditumpuk di tempat yang telah ditentukan. Sampah terus menumpuk dari hari ke hari, dan seperti yang sering kita amati, ada bukit sampah. Selain itu, sampah juga dapat menyebabkan wabah penyakit. Sampah jelas memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki aspek positif.

Produksi sampah plastik di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022, total sampah plastik mencapai 12,54 juta ton. Menurut Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbunan sampah plastik di Indonesia telah meningkat sejak tahun 1995. Sepanjang tahun 2022, masyarakat Indonesia menghasilkan 69 juta ton sampah, dengan 18,2 persen atau 12,5 juta ton di antaranya berupa sampah plastik. Jumlah ini terus mengalami kenaikan eksponensial sejak tahun 1995. Beberapa kota, seperti Bandung dan beberapa daerah di Jawa Timur, menghadapi situasi darurat sampah atau menuju kondisi darurat akibat penutupan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan pertumbuhan penduduk yang meningkatkan konsumsi.

Pengelolaan sampah yang tidak memadai akan memberikan dampak yang merugikan, terutama bagi kesehatan masyarakat setempat. Risiko kesehatan dari sampah dapat berupa cacingan, tifus, kolera, diare, dan infeksi jamur. Sampah sering kali menumpuk di sungai, mengganggu aliran air secara alami dan dapat mengakibatkan

banjir. Bau yang tidak sedap adalah efek lain dari limbah cair di dekat saluran air. Praktik pengelolaan limbah yang buruk menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak bersih. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Konflik sosial dapat muncul dari sampah, terutama ketika ada persaingan dalam hal pembuangan dan pengelolaan sampah. Konflik antar komunitas atau wilayah, misalnya, tentang tempat pembuangan sampah, polusi yang ditimbulkannya, atau persaingan dalam industri daur ulang. Selain itu, isu-isu terkait sampah seperti dampak negatif polusi udara dan air terhadap kesehatan dan perselisihan mengenai penggunaan lahan untuk pembuangan sampah dapat menjadi akar masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan sosial. Persaingan untuk mendapatkan tempat pembuangan sampah dapat menyebabkan perselisihan antar komunitas atau wilayah. Polusi sampah dapat menyebabkan perselisihan tentang dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan persaingan dalam industri daur ulang limbah dapat menyebabkan keresahan sosial dan ekonomi di masyarakat setempat. Dalam upaya untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, pengelolaan sampah yang tidak tepat berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Contoh permasalahan sosial yang timbul akibat pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat dilihat di beberapa kota di Indonesia. Menurut laporan dari Detik Jabar.com, pada tahun 2022 Kota Bandung mengalami peningkatan produksi sampah yang menyebabkan masalah darurat sampah. Sampah menjadi isu besar di Kota Bandung, yang kini berstatus darurat sampah. Pemerintah Kota Bandung sedang merancang strategi untuk mengatasi permasalahan ini. Bandung, yang kini telah bertransformasi menjadi kota metropolitan, menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Dulunya dikenal

sebagai "Surga Pembuangan," Bandung pernah mendapatkan julukan "Lautan Sampah" pada tahun 2005. Pada tahun tersebut, tumpukan sampah menguasai Kota Bandung akibat meledaknya dan longsohnya TPA Leuwigajah di Kota Cimahi, yang menyebabkan penutupan TPA tersebut. Akibatnya, pembuangan sampah dari wilayah Bandung Raya yang bergantung pada TPA Leuwigajah pun terhenti.

Mengutip dari malang-post.com dan goodstar.id pada tahun 2022, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan produksi sampah. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa Jawa Timur menghasilkan sekitar 5 juta ton sampah, yang merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap total sampah nasional. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan adanya darurat sampah, peningkatan produksi sampah ini menunjukkan perlunya perhatian dalam pengelolaan sampah di Jawa Timur. Selain itu, Kota Batu, yang terletak di Jawa Timur, juga telah menghadapi masalah serius terkait pengelolaan sampah. Meskipun demikian, informasi lebih lanjut mengenai permasalahan sampah di Jawa Timur pada tahun 2022 mungkin perlu dirujuk melalui sumber-sumber lain atau instansi terkait.

Beberapa konflik yang terjadi akibat permasalahan sampah di Jawa Timur seperti penumpukan sampah plastik di sungai-sungai dan pesisir pantai Jawa Timur yang belum tertangani dengan baik, telah menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Kebakaran tempat pembuangan akhir sebagai bukti kurangnya pengelolaan sampah oleh pemerintah yang menyebabkan konflik terkait penanganan sampah. Gugatan terhadap Gubernur Jawa Timur terkait penanganan sampah popok yang masuk kategori sampah domestik, yang dianggap kurang ditangani dengan baik. Somasi terhadap tiga

Gubernur di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat karena dianggap lalai dalam mengelola sampah dan membiarkan industri membuang limbah sembarangan, yang menyebabkan kondisi sungai buruk dan tercemar.

Pada tahun 2022 Yogyakarta mengalami darurat sampah. Hal ini terjadi karena warga yang mendukung aksi 'Banyak Menolak Banyak Melawan' memblokir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau yang dikenal dengan TPA Piyungan. Di persimpangan tiga pintu masuk utama TPST Piyungan, warga melakukan aksi. Mereka meratapi pencemaran lingkungan dan menuntut agar TPST ditutup secara permanen sebagai tuntutan mereka. Warga menolak transisi pembuangan sampah ke lahan baru dan meminta untuk menutup akses ke TPST Piyungan karena dampak lingkungan tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Penolakan tersebut terkait transisi pembuangan sampah ke lahan yang baru di sebelah utara TPST Piyungan dengan luas lahan 2,1 hektar. Dampak yang ditimbulkan dari blockade warga di TPST Piyungan yaitu tumpukan sampah yang menggunung dimana-mana.

Penuhnya kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia berada dalam kondisi kritis. Masalah ini diperburuk oleh meningkatnya jumlah timbunan sampah yang tidak dikelola secara optimal, sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan, kebersihan, dan kesehatan. Salah satu contoh kasus adalah TPA Piyungan di Yogyakarta. TPA yang telah beroperasi sejak 1996 ini terpaksa ditutup sementara karena tumpukan sampah yang melebihi kapasitasnya. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berencana untuk menutup layanan TPA Piyungan secara permanen.

Sampah di Piyungan sebenarnya sudah diproyeksikan oleh pemerintah daerah setempat melebihi kapasitas. TPA tersebut diperkirakan hanya bisa bertahan hingga akhir tahun 2022. Bahkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta menyebutkan bahwa TPA Piyungan sudah melebihi kapasitasnya sejak tahun 2012. Tingginya tampungan sampah ini karena TPA Piyungan menyerap sampah dari tiga daerah, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Setidaknya dalam sehari sekitar 630 ton sampah masuk ke lokasi pembuangan sampah seluas 12,5 hektar itu.

Menurut laporan dari Kompas.com, pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan revitalisasi untuk meningkatkan kapasitas TPA Piyungan sebesar 438.000 ton sampah, yang cukup untuk kapasitas pengelolaan selama dua tahun ke depan, hingga 2022. Sementara itu, data dari Sekber Kartamantul (2022) yang dikutip dari bappeda.jogjakota.go.id mencatat bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan mencapai sekitar 700 ton per hari. Jumlah ini merupakan akumulasi sampah dari tiga wilayah, dengan Kota Yogyakarta menyumbang rata-rata 270 ton per hari, menempati peringkat kedua di antara wilayah lainnya.

Menurut TribunJogja.com, Kepala DLHK DIY Kuncoro Cahyo Aji mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, volume sampah di TPA Piyungan meningkat sekitar 7,5 persen setiap tahun. Pada tahun 2022, rata-rata sampah yang masuk ke TPA Piyungan mencapai 742 ton per hari. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2023, rata-rata sampah yang masuk TPA Piyungan mencapai 707 ton per hari. Salah satu penyebab utama meluapnya sampah di TPA adalah peningkatan produksi sampah yang terus meningkat dan sulit dikendalikan. Indikasi ini terlihat dari data timbulan

sampah yang tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2019-2022.

Tabel 1. 1 Data penimbunan sampah di kota Yogyakarta

No.	Tahun	Volume sampah/ ton
1.	2020	565,00
2.	2021	565,00
3.	2022	647,00
4.	2023	780,00
5.	2024	450,00

Sumber: terasmalioboro. data-pengelolaan-sampah

Pada tahun 2020 dan 2021, volume sampah tetap stabil di angka 565 ton. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan menjadi 647 ton, dan pada tahun 2023 volume sampah mencapai 780 ton, yang merupakan puncaknya dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024, volume sampah menurun drastis menjadi 450 ton. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif atau perubahan dalam pola konsumsi dan produksi masyarakat.

Keadaan darurat sampah dinyatakan ketika akumulasi sampah melebihi kapasitas reguler dan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap keseimbangan ekosistem, kesehatan masyarakat, dan kebersihan lingkungan. Keadaan darurat sampah meliputi volume sampah yang tidak normal serta konsekuensi sosial, ekonomi, dan ekologi yang signifikan. Masalah ini muncul ketika sampah menumpuk di area strategis karena sistem pengelolaan sampah tidak mampu mengimbangi peningkatan volume sampah. Hal ini dapat menimbulkan keresahan sosial dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Situasi darurat sampah di Yogyakarta tidak diragukan lagi merupakan hasil dari kalkulasi kebijakan publik, perilaku masyarakat, dan prioritas pemerintah yang tampaknya tidak cukup untuk mengatasi masalah sampah. Memperluas atau menambah lahan transisi di TPST Piyungan adalah tindakan yang paling sering dilakukan oleh pemerintah sejak masalah ini muncul pertama kali, namun hal ini tidak mengatasi akar masalah. Penutupan TPST Piyungan telah dilakukan beberapa kali sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perluasan dan pembukaan lahan transisi di TPST Piyungan. Penutupan TPST Piyungan itu mengakibatkan beberapa masalah salah satunya adalah penumpukan sampah di pinggir jalan di sudut-sudut kota, seiring waktu berjalan hal tersebut tentu menimbulkan masalah karena sampah yang di tumpuk menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika implementasi kebijakan penanganan darurat sampah terhadap konflik sosial di Kota Yogyakarta tahun 2022?

Tujuan Penelitian

Menganalisis dinamika implementasi kebijakan penanganan darurat sampah terhadap konflik sosial di Kota Yogyakarta tahun 2022?

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pemahaman terhadap teori kebijakan publik, terutama dalam konteks kebijakan penanganan darurat sampah dan bagaimana implementasinya dapat memicu konflik sosial.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan penanganan darurat sampah, termasuk saran-saran untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keadilan sosial dalam implementasi kebijakan.

Penelitian Terdahulu

Landasan penelitian ini telah dibangun oleh penelitian sebelumnya, yang diulas dalam literatur. Namun, untuk memperdalam pemahaman tentang (Kebijakan Penanganan Darurat Sampah Terhadap Konflik Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2022), diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dan penelitian yang lebih mendalam. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk (Menganalisis Kebijakan Penanganan Darurat Sampah Kota Yogyakarta Terhadap Konflik Sosial Tahun 2022).

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	Suci Emilia	Dinamika, Problematika, dan	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan

	Fitri, Ray Ferza	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik (sstudi kasus kota Bogor dan kota Bekasi)	sampah plastik di Indonesia dengan menyoroti tantangan dan hambatan dalam penerapan kebijakan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah terintegrasi dengan praktik yang ada, mengidentifikasi pergeseran dari metode tradisional menuju pendekatan 3R, serta mengevaluasi peran kementerian-kementerian terkait dan tantangan dalam kolaborasi antara pemerintah dan sektor bisnis. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan sampah plastik di tingkat daerah dan mendalami kebutuhan akan arahan yang lebih jelas untuk meningkatkan efektivitas upaya pengelolaan sampah plastik di tingkat lokal.
2	Patria AdhiBaskoro, Badrudin Kurniawan	Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Tmana Kabupaten Sidoarjo	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan tujuan membantu pemerintah Indonesia mengatasi isu sampah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah saat ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mengakibatkan lingkungan yang kotor, serta menghadapi tantangan seperti kekurangan tenaga kerja dan penggunaan peralatan manual. Di

			sisi lain, organisasi informal menunjukkan respons yang lebih efektif dibandingkan dengan organisasi formal.
3	Gledys Deyana Wahyudin, Arie Afriansyah	Penanggulangan Pencegahan Sampah Plastik di Laut Berdasarkan Hukum Internasional	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan internasional mengenai pencemaran sampah laut dan mengevaluasi strategi Tiongkok serta Indonesia dalam mengurangi sampah plastik di laut. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menilai kebijakan pengurangan dan pengolahan sampah, serta produksi barang ramah lingkungan, dan menyoroti peran pendidikan serta pelatihan dalam solusi pengelolaan sampah. Temuan penelitian menekankan pentingnya hukum internasional dalam mendorong penerapan peraturan nasional untuk mengatasi masalah sampah laut.
4	Makmur Selomo, Agus Bintara Birawida, Anwar Mallongi, Muammar	Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat menabung masyarakat di Bank Sampah Pelita Harapan, Kota Makassar, yang menerapkan metode 3R dengan insentif finansial. Dalam penelitian ini, 200 rumah tangga dijadikan sampel dan dianalisis menggunakan uji chi square serta uji phi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan memengaruhi partisipasi dalam menabung, sedangkan pendapatan dan jumlah anggota keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan.
5	Helnafri Ankesa, Siti Amanah, Pang S.	Partisipasi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan dalam	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan pengelolaan sampah di Sub DAS Cikapundung dengan menilai perkembangan kelompok seperti Sadulur

	Asngari	Penanganan Sampahdi Sub DAS Cikapundung, Provinsi Jawa Barat	Satujuan, Rumah Pangan Lestari, dan Bank Sampah RW 08. Selain itu, penelitian ini juga memeriksa dinamika kelompok, termasuk interaksi antara anggota, demografi, dan praktik pengelolaan sampah yang diterapkan.
6	M Fajar Anugerah, Mhd Rafi Yahya	Analisis Rencana Kebijakan Aksi Bersih Sampah Kota Pekanbaru	Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah sampah di Kota Pekanbaru dengan merancang dan mengevaluasi rencana aksi untuk kebersihan sampah. Penelitian ini fokus pada analisis kebijakan, pembuatan peraturan daerah, serta kajian konteks lokal yang mencakup aspek budaya, sosial, dan ekonomi. Rencana aksi tersebut melibatkan pengelolaan, pengembangan kapasitas, penanganan, dan pengurangan sampah melalui kampanye serta edukasi, dengan tujuan untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
7	Erpin Habibah, Febi Novianti, Hanafi Saputra	Analisis Terhadap Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Yogyakarta Menggunakan Pemodelan Sistem Dinamis	Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengelolaan sampah di Yogyakarta dengan menggunakan teknik statistik dan pemodelan sistem dinamik. Penelitian ini mengidentifikasi masalah seperti infrastruktur TPA yang tidak memadai, kebijakan yang ambigu, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya budaya pengelolaan sampah. Temuan dari penelitian ini merekomendasikan perlunya keterlibatan pemimpin lokal, partisipasi aktif masyarakat, dan peningkatan komunikasi untuk meningkatkan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah.

8	Diana Hertati	Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Alternatif Green City di Kota Surabaya	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup mempengaruhi peningkatan volume sampah di Kota Surabaya. Fokus penelitian ini meliputi penerapan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle), pelaksanaan program bank sampah, dan upaya pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup serta mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
9	Aloyius Hari Kristianto 1, Jones Parlindungan Nadapdap	Dinamika Sistem Ekonomi Sirkular Berbasis Masyarakat Metode Causal Loopdiagram Kota Bengkayang	Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep "ekonomi sirkular" di Kota Bengkulu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Penelitian ini melibatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah daerah, pengusaha, dan aktivis lingkungan, serta meliputi pendirian bank sampah, pengenalan konsep 3R ke rumah tangga, dan penyediaan panduan pengelolaan sampah di setiap desa. Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam partisipasi masyarakat dianggap krusial untuk suksesnya penerapan ekonomi sirkular dan pencapaian kemandirian masyarakat.
10	R. Mohamad Mulyadin, Mohamad Iqbal & Kuncoro Ariawan	Konflik Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta dan Upaya Mengatasinya	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang perselisihan dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Dengan menggunakan metodologi studi kasus dan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, menganalisis

			penyebab konflik, dan mengusulkan solusi alternatif, termasuk pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas peneliti menemukan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mendalami pengelolaan dan penanganan sampah dalam konteks yang beragam. Mulai dari menganalisis kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kota Bogor dan Kota Bekasi, mengimplementasikan kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, hingga mengeksplorasi upaya penanggulangan pencemaran sampah plastik di laut dan solusi seperti bank sampah di Kota Makassar. Fokus penelitian melibatkan analisis, evaluasi, dan pencarian solusi terhadap berbagai aspek pengelolaan sampah dalam konteks yang berbeda.

Perbedaan yang peneliti temukan di penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada pada konteks penelitian dan focus penelitian. Pada konteks penelitian terdahulu di atas peneliti menemukan bahwa penelitian tersebut mencakup berbagai konteks pengelolaan sampah, mulai dari kebijakan di tingkat kota, implementasi di tingkat kecamatan, hingga upaya penanggulangan di tingkat nasional seperti pencemaran sampah plastik di laut dan solusi seperti bank sampah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbatas pada konteks Kota Yogyakarta dan secara khusus membahas kebijakan penanganan darurat sampah yang diterapkan pada tahun 2022.

Penelitian terdahulu berfokus pada analisis, evaluasi, dan solusi terhadap permasalahan pengelolaan sampah di berbagai konteks. Ini mencakup rentang topik yang lebih luas, dari implementasi kebijakan hingga upaya penanggulangan di tingkat nasional.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus pada evaluasi efektivitas kebijakan penanganan darurat sampah di Kota Yogyakarta, dengan penekanan khusus pada dampaknya terhadap penanggulangan krisis sampah dan potensi konflik sosial. Dengan kata lain, perbedaan utama terletak pada lingkup dan fokus penelitian, di mana penelitian mencakup variasi konteks dan topik terkait pengelolaan sampah, sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih terfokus pada situasi darurat sampah di Kota Yogyakarta.

Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap krusial dalam proses kebijakan publik, di mana kebijakan yang telah disusun diubah menjadi tindakan nyata. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara berbagai pihak, termasuk birokrat, politisi, dan masyarakat, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti struktur organisasi, sumber daya yang tersedia, dan dinamika politik. Implementasi umumnya dipahami sebagai pelaksanaan undang-undang, di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menerapkan kebijakan dengan tujuan mencapai target program kebijakan. Selain itu, implementasi juga merupakan fenomena kompleks yang dapat dilihat sebagai sebuah proses, hasil (output), atau dampak (outcome) (Budi Winarno, 2007: 144).

Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada intinya, setiap kebijakan publik selalu diikuti oleh tahap implementasi. Implementasi dianggap sebagai elemen kunci dan tahap yang sangat

menentukan dalam keseluruhan proses kebijakan (Birklan, 2001: 177; Heineman et al., 1997: 60; Ripley dan Franklin, 1986; Wibawa dkk., 1994: 15). Pandangan ini didukung oleh Edwards III (1984: 1), yang menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan tidak akan berhasil diimplementasikan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terjadi setelah pengarah resmi kebijakan dikeluarkan, mencakup upaya untuk mengelola input guna menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Konsep implementasi dapat dijelaskan secara sederhana dengan membaginya menjadi dua bagian, yaitu bahwa implementasi mencakup keselarasan antara maksud, output, dan outcome. Berdasarkan deskripsi ini, formula implementasi terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, serta dampak sebagai konsekuensi. Selain itu, implementasi juga merupakan keselarasan fungsi yang melibatkan kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Fokus utama dari kedua fungsi ini terletak pada kebijakan itu sendiri, serta hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam jangka waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya melalui hasil kegiatan pemerintah. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980: 6), yang menyatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui aktivitas lembaga pemerintah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kebutuhan akan implementasi kebijakan didasarkan pada pandangan bahwa setiap kebijakan yang dirancang harus diterapkan. Implementasi kebijakan penting karena berbagai alasan atau perspektif. Menurut perspektif masalah kebijakan

yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi diperlukan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kebijakan yang ada.

Beberapa teori implementasi kebijakan mencakup model top-down, bottom-up, dan hybrid. Model top-down menekankan arahan dari pembuat kebijakan pusat, sementara model bottom-up menekankan peran penting pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Model hybrid mengombinasikan kedua pendekatan ini untuk menciptakan keseimbangan antara arahan pusat dan adaptasi lokal. Teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang dikenal dengan pendekatan dampak langsung dan tidak langsung pada implementasi, menyoroti empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kotabaru, Yogyakarta. Dengan menekankan komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi, teori ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Edwards III mengemukakan pendekatan masalah implementasi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dari pertanyaan tersebut, dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prasyarat bagi keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, serta struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Keempat faktor ini dianggap sebagai kriteria yang

harus ada dalam implementasi suatu kebijakan. Proses implementasi kebijakan bersifat dinamis dan melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Subkategori dari faktor-faktor dasar ini ditampilkan untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan.

a. Communication (Komunikasi)

Agar implementasi kebijakan berhasil, harus ada jalur komunikasi yang terbuka antara pihak-pihak terkait, masyarakat umum, dan pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pemahaman bersama mengenai tujuan dan prosedur implementasi kebijakan dapat dipastikan melalui komunikasi yang terbuka dan transparan.

Faktor penting dalam implementasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi adalah tiga elemen penting dalam implementasi kebijakan. Transmisi adalah proses pemberian instruksi dan informasi kepada para pelaksana kebijakan, termasuk cara penyampaian dan orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikannya. Sejauh mana tujuan dan tanggung jawab para pelaksana kebijakan dipahami dengan jelas disebut sebagai kejelasan. Sejauh mana suatu kebijakan konsisten dengan nilai dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dengan kebijakan-kebijakan lain yang telah diterapkan, disebut sebagai konsistensi.

b. Resources (Sumberdaya)

Ketersediaan sumber daya, baik secara finansial maupun dalam bentuk personil dan peralatan, memainkan peran kunci dalam implementasi

kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan dapat terhambat atau tidak mencapai hasil yang diinginkan.

Kewenangan, staf, informasi, dan fasilitas merupakan sumber daya yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Personil, atau disebut juga sumber daya manusia, bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Data atau informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan disebut informasi. Kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan disebut sebagai wewenang. Fasilitas adalah prasarana dan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Keempat sumber daya ini bekerja paling baik jika digabungkan, dan kekurangannya dapat mempersulit implementasi kebijakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka keempat sumber daya tersebut harus dipertimbangkan selama implementasi kebijakan.

c. Disposisi (Sikap)

Sejauh mana sebuah kebijakan berhasil diimplementasikan dapat bergantung pada sikap dan keyakinan mereka yang melaksanakannya. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dibantu dengan adanya pandangan positif dan komitmen yang kuat terhadap tujuan-tujuannya.

Kesediaan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka mencapai tujuan kebijakan disebut sebagai disposisi. Cara para pelaku kebijakan berperilaku mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan karena

hal ini menentukan seberapa besar dedikasi dan motivasi mereka untuk menjalankan kebijakan hingga selesai.

Salah satu sumber daya yang paling penting untuk mengimplementasikan kebijakan adalah sumber daya manusia, atau staf birokrasi. Standar implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ketersediaan personel yang berpengetahuan dan berdedikasi. Selain itu, karena mempengaruhi koordinasi, komunikasi, dan efisiensi dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi juga berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan.

Para pelaku kebijakan dapat menerima penghargaan, pengakuan, atau imbalan lain sebagai imbalan atas kinerja mereka dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini dapat disebut sebagai insentif atau dorongan kebijakan. Kinerja dan motivasi para pelaku kebijakan selama pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh insentif.

d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur birokrasi yang efektif. Komponen utama dari struktur birokrasi yang memfasilitasi implementasi kebijakan adalah prosedur pengambilan keputusan yang efektif, pembagian tugas yang jelas, dan koordinasi yang baik.

Untuk menjamin bahwa kebijakan dapat diterapkan secara konsisten dan berhasil, prosedur operasi standar, atau SOP, digunakan. SOP dapat menjamin bahwa para pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas mereka secara akurat dan dengan pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka.

Prosedur operasi standar (SOP) memainkan peran penting dalam memastikan konsistensi dan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Istilah "fragmentasi" menggambarkan pemecahan proses pembuatan atau pelaksanaan kebijakan menjadi beberapa bagian atau pemangku kepentingan. Karena membuat berbagai pihak yang terlibat menjadi lebih sulit untuk berkoordinasi, fragmentasi dapat berdampak pada efisiensi dan koordinasi implementasi kebijakan. Fragmentasi dapat mempersulit koordinasi dan menurunkan efektivitas implementasi kebijakan, sehingga kebijakan tersebut menjadi kurang berhasil.

2. Konflik sosial

Konflik sosial adalah fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti, menghasilkan berbagai teori konflik yang memerlukan pemetaan untuk memudahkan pemahaman. Secara umum, teori konflik dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: klasik dan modern. Tokoh-tokoh sosiologi modern yang mengemukakan teori konflik meliputi Karl Marx, Lewis A. Coser, dan Ralf Dahrendorf. Teori konflik klasik cenderung melihat konflik dari perspektif sifat alami manusia yang cenderung saling memusuhi dan berusaha menguasai, terutama terkait kekuasaan. Sementara itu, teori konflik modern lebih kompleks dan muncul sebagai kritik terhadap teori fungsionalisme struktural.

Konflik didefinisikan sebagai perbedaan atau pertentangan antara orang atau kelompok sosial yang diakibatkan oleh upaya pencapaian tujuan dengan menentang pihak lain serta perbedaan kepentingan. Ancaman atau kekerasan fisik digunakan

dalam upaya untuk mengalahkan pihak lain demi mencapai tujuan. (Soerjono Soekanto, 2006: 91).

Ada dua paradigma yang berbeda untuk memahami akar penyebab konflik, yaitu teori konflik klasik dan modern. Menurut teori konflik tradisional, ketidaksepakatan atas keinginan, kepentingan, dan kehendak hanyalah bagian dari sifat alamiah manusia yang menyebabkan konflik. Teori konflik klasik dipengaruhi oleh karya akademisi seperti Thomas Hobbes, Jean Bodin, Nicolo Machiavelli, Ibnu Khaldun, dan Polybus. Teori ini mengakui adanya keragaman sekaligus menyoroti bagaimana konflik dapat memperkuat kohesi kelompok.

Di sisi lain, teori konflik modern melihat konflik sebagai hasil dari perbedaan kepentingan antara kelompok atau individu. Karl Marx, Ralf Dahrendorf, dan Randall Collins adalah beberapa ahli yang menciptakan dasar bagi teori konflik modern. Meskipun menekankan ketidak sepahaman, teori ini juga mencatat bahwa konflik dapat memperkuat persatuan dalam suatu kelompok.

Perbedaan utama antara keduanya adalah bagaimana mereka menangani penyebab utama konflik. Keinginan yang berbeda dan aspek-aspek lain dari sifat manusia disoroti oleh teori konflik klasik, sedangkan perbedaan kepentingan adalah fokus utama teori konflik modern. Namun, keduanya setuju bahwa konflik dapat mendorong persatuan kelompok.

Sesuai dengan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, konflik muncul karena adanya perbedaan keyakinan, aspirasi, atau tujuan yang ingin dicapai dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi individu maupun masyarakat.

Konflik sosial, sebagaimana dijelaskan, terjadi antara kumpulan individu seperti kelompok, organisasi, komunitas, dan kerumunan orang. Dalam konteks ini, konflik kelompok menjadi sinonim dengan konflik sosial. Definisi Coser (1967:232) menyatakan bahwa konflik sosial adalah perjuangan yang terfokus pada nilai-nilai, klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka. Para pihak yang terlibat tidak hanya bertujuan untuk memperoleh nilai-nilai yang diinginkan, tetapi juga untuk menetralkan, melukai, atau bahkan mengeliminasi saingan mereka. Penting untuk dicatat bahwa konflik sosial tidak selalu mengakibatkan kerusakan, kerugian, atau cedera, tetapi dalam banyak kasus, interaksi di antara pihak-pihak yang bertikai kemungkinan besar akan memiliki dampak negatif tersebut. Konflik sosial mencakup berbagai fenomena sosial, termasuk konflik kelas, rasial, agama, dan komunal; kerusuhan, pemberontakan, revolusi; pemogokan dan gangguan sipil; serta pawai, demonstrasi, pertemuan protes, dan kejadian sejenisnya.

a. Faktor penyebab konflik

Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab atau yang mendasari terjadinya perselisihan atau konflik (Soekanto, 2006: 91-92):

1. Perbedaan-perbedaan individual

Pertentangan di antara mereka dapat timbul dari perbedaan pendirian dan perasaan, terutama bila perbedaan itu menyangkut sentimen yang dianut bersama.

Ketegangan antara orang atau kelompok dari latar belakang yang berbeda dapat muncul dari perbedaan individu, seperti perbedaan cara pandang, emosi, dan latar belakang budaya. Ketika perbedaan-perbedaan ini tidak

dikelola dengan baik, mereka dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam interaksi sosial, yang dapat menyulut konflik sosial. Untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan individu, sangat penting untuk mengenali dan mengelolanya dalam konteks konflik sosial.

2. Perbedaan dalam budaya

Perbedaan kepribadian individu juga dipengaruhi oleh pola budaya yang menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Pola-pola ini pada gilirannya akan mempengaruhi kepribadian individu dalam budaya tersebut.

Ketegangan antara orang atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda dapat diakibatkan oleh perbedaan budaya, seperti perbedaan nilai, adat istiadat, dan kebiasaan. Ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam interaksi sosial dapat terjadi akibat pengelolaan yang tidak tepat atas perbedaan-perbedaan ini, yang dapat memicu konflik sosial. Untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, sangat penting untuk mengenali dan mengelola perbedaan-perbedaan ini dalam konteks konflik sosial.

3. Kepentingan yang berbeda

Konflik juga dapat muncul dari perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan lainnya.

Ketegangan antar individu atau kelompok yang berbeda kepentingan dapat muncul dari perbedaan kepentingan, baik sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Pengelolaan yang tidak tepat terhadap perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan konflik sosial sebagai akibat dari perseteruan dan pertikaian antar kelompok yang memperebutkan sumber daya yang langka. Untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan ini, sangat penting untuk mengenali dan mengelola perbedaan-perbedaan kepentingan.

4. Transformasi sosial

Perubahan sosial yang cepat dalam waktu singkat akan mengubah nilai-nilai masyarakat, yang dapat menyebabkan munculnya kelompok-kelompok baru.

Perubahan total dalam bentuk, karakter, sifat, dan sebagainya dari suatu masyarakat disebut sebagai transformasi sosial. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dalam perubahan ini dapat menjadi tegang dan bermusuhan sebagai akibat dari perubahan ini. Konflik dapat muncul, misalnya, antara kelompok yang mendukung dan menentang transformasi sosial yang disebabkan oleh penyesuaian norma, nilai, atau struktur sosial. Akibatnya, dalam kerangka teori konflik Soerjono Soekanto, transformasi sosial dapat menimbulkan konflik sosial karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan perubahan sosial.

b. Akibat terjadinya konflik

Adanya pertentangan dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain sebagai berikut (Soekanto, 2006: 95-96):

1. Semakin kuatnya rasa persatuan kelompok

Rasa solidaritas di dalam kelompok akan semakin kuat apabila terjadi pertentangan antara kelompok tersebut dengan kelompok lain.

2. Hancurnya atau rusaknya kohesi kelompok

Kesatuan kelompok akan terganggu ketika terjadi konflik internal pada salah satu kelompok yang ada.

3. Perubahan kepribadian individu

4. Perusakan harta benda dan korban jiwa

5. Akomodasi, dominasi, dan penundukan salah satu pihak.

c. Cara penyelesaian konflik

Ada beberapa pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian konflik (Soekanto, 1990: 77-78), antara lain:

1. Pemaksaan

Menekan dan memaksa pihak lain untuk menyerah adalah cara untuk menyelesaikan situasi. Salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih lemah dari pihak lain dalam hal metode paksaan. Karena adanya keharusan untuk memaksa salah satu pihak untuk menyerah dan mengalah, strategi ini sering kali kurang efektif.

2. Mengalah

Sebuah strategi di mana para pihak berkompromi dengan tuntutan satu sama lain untuk menyelesaikan konflik yang ada.

3. Arbitrase

Sebuah jalan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga yang tidak memihak akan mendengarkan keluhan kedua belah pihak dan bertindak sebagai "hakim" untuk mencari penyelesaian yang mengikat secara hukum.

4. Penyelesaian

memediasi konflik dengan mediator yang telah diundang. Mediator dapat membantu pengumpulan informasi, mengidentifikasi contoh-contoh komunikasi yang buruk, mendefinisikan masalah, dan membersihkan jalan untuk penyelesaian masalah secara komprehensif.

5. Harmonisasi

Bertujuan untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berlawanan untuk mencapai saling pengertian. pertukaran pandangan.

Otoritas dan posisi adalah dua gagasan mendasar dalam teori konflik yang merupakan fakta sosial. Karena selalu ada kelompok yang berlawanan dalam masyarakat-penguasa dan yang dikuasai-distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata merupakan salah satu faktor yang secara sistematis menentukan konflik sosial (Soetomo, 1995:33).

Definisi Konsepsional

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses menerapkan kebijakan publik yang telah dirancang ke dalam tindakan nyata di lapangan. Ini melibatkan langkah-langkah terstruktur untuk mengubah keputusan dan strategi kebijakan menjadi praktik sehari-

hari dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Implementasi kebijakan mencakup koordinasi antara berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya, prosedur, dan struktur organisasi yang relevan. Selain itu, proses ini memerlukan penyesuaian terhadap kondisi lokal dan pemantauan terus-menerus untuk mengidentifikasi serta mengatasi tantangan yang muncul, guna memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komunikasi yang baik, dukungan sumber daya yang cukup, sikap pelaksana yang konstruktif, dan integrasi dengan struktur birokrasi yang ada..

2. Konflik Sosial

Konflik sosial dapat bermanifestasi sebagai ketegangan, pertentangan, atau bentrokan verbal, simbolik, atau fisik antara individu, kelompok, atau lapisan masyarakat karena ketidaksepakatan, perbedaan nilai, kepentingan, atau tujuan. Konflik sosial dapat terjadi di tingkat individu, antarpribadi, kelompok, atau masyarakat dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti perbedaan sosial, ekonomi, politik, atau budaya. Konflik sosial dapat mengarah pada perubahan positif dan inovasi, sehingga tidak selalu merupakan hal yang buruk. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, konflik sosial juga dapat menyebabkan ketidakstabilan, kekerasan, dan kehancuran sosial.

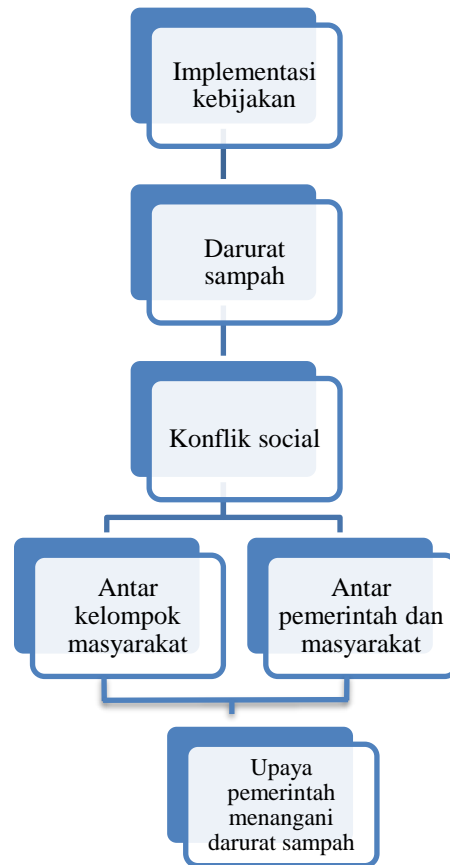
Defisini Operasional

Tabel 1. 3 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Implementasi Kebijakan	Komunikasi	Transmisi, kejelasan, konsistensi
		Sumberdaya	Staf, informasi, wewenang, fasilitas
		Disposisi	Pengaruh disposisi, staf birokrasi, insentif
		Struktur birokrasi	Standard operating procedures, fragmentation
2	Konflik Sosial	Konflik pemerintah dan masyarakat	Perizinan, instrumentasi dan kendali
		Konflik antar kelompok masyarakat	Peranan masyarakat dalam mengambil keputusan, adanya perlawanan

Sumber : implementasi kebijakan Edward (1980), konflik sosial Coser (1956)

Kerangka Berpikir



Metode Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif tentang dinamika implementasi kebijakan penanganan darurat sampah dan dampaknya terhadap konflik sosial di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 menawarkan manfaat penting dalam memahami kompleksitas isu yang dihadapi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif, seperti pandangan masyarakat, interaksi antara pemangku kepentingan, dan akar penyebab konflik sosial. Melalui analisis kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan dan memperoleh wawasan mendalam mengenai penerimaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Pendekatan deskriptif juga memberikan detail tentang konteks lokal dan proses implementasi yang spesifik, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks. Temuan dari penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan pemerintah daerah untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam menangani masalah sampah dan mengurangi konflik sosial di masa mendatang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif mengacu pada pengumpulan data yang berbentuk kata-kata, gambar, dan lainnya. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, serta dokumentasi lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas dinamika

kebijakan penanganan darurat sampah terhadap konflik sosial di Kota Yogyakarta pada tahun 2022.

2. Lokasi Penelitian

Daerah Istimewa Yogyakarta, Kotabaru dan lembaga terkait untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan penanganan sampah di Kota Yogyakarta, wawancara dengan dinas-dinas terkait yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan sampah dapat menjadi langkah yang efektif. Berikut adalah beberapa dinas terkait yang mungkin dapat diwawancarai:

Tabel 1. 4 Data informan/ responden

No	Instansi/Kelompok	Nama	Posisi/Jabatan	Lokasi	Waktu
1	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Satiti Wulandari	Staf Tim Kerja Operasional Penanganan Sampah	Kapanewon Gondokusuman	14 Juni 2024
2	Kalurahan Kotabaru	Bambang Yunigiarto	Kasi Pemerintah Keamanan dan Ketertiban	Kotabaru, Yogyakarta	14 Juni 2024
3	Masyarakat	Yudi	Ketua RW 4 sekaligus pelaku usaha di sekitar TPST	Kotabaru, Yogyakarta	25 Juli 2024
4	Masyarakat	Atri	Masyarakat Kotabaru	Kotabaru, Yogyakarta	24 Juli 2024

Sumber : langsung dari penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa wawancara yang dilakukan bertujuan untuk melengkapi penelitian tentang pengelolaan sampah di Yogyakarta, khususnya di

Kotabaru, dengan perspektif yang menyeluruh dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Data yang dikumpulkan dari wawancara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan pengelolaan sampah serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta memberikan wawasan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa depan.

3. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder yang diperoleh dari keterangan masyarakat, seperti warga negara, yang berkaitan dengan kebijakan penanganan sampah di Kota Yogyakarta tahun 2022.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data mengenai kinerja program pengelolaan sampah yang diukur dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Yogyakarta tahun 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data wawancara (interview), dan dokumentasi.

1. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data tentang Dinamika Kebijakan Penanganan Darurat Sampah Terhadap Konflik Sosial Di Kota Yogyakarta Tahun 2022. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktural, Wawancara semi struktural adalah jenis wawancara yang menggabungkan unsur wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara semi struktural, interviewer menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, namun juga memberikan kebebasan pada responden untuk memberikan jawaban yang lebih bebas dan tidak dibatasi. Wawancara semi struktural dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan, mengatur waktu yang tepat, mencatat jawaban, menganalisis data terkait penelitian dinamika implementasi kebijakan penanganan darurat sampah terhadap konflik sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2022, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk penanganan darurat sampah terhadap konflik social di Yogyakarta.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Dinamika Kebijakan Penanganan Darurat Sampah Terhadap Konflik Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2022. Teknik pengumpulan data dengan

dokumentasi ditunjukkan kepada subyek penelitian yang berupa bukubuku, dokumen, foto-foto, dan data relevan lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai pengumpulan dokumentasi pendukung rata-rata penelitian yang dibutuhkan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data sehingga menjadi lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk membuat informasi yang dikumpulkan menjadi lebih jelas dan eksplisit. Data yang dikumpulkan berasal dari wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Langkah-langkah dalam analisis penelitian ini meliputi:

a. Analisis Data

Analisis data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses reduksi data melibatkan seleksi, pembuatan ringkasan atau uraian singkat, pengelompokan data ke dalam pola-pola, pembuatan transkrip penelitian untuk memperjelas, memperpendek fokus, menghilangkan bagian yang tidak relevan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan akhir yang tepat sesuai dengan permasalahan fokus utama.

b. Triangulasi

Dalam berbagai karyanya, Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode untuk mengkaji fenomena

dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Konsep triangulasi yang dikemukakan oleh Denkin masih digunakan oleh peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurut Denkin, triangulasi mencakup empat aspek: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan oleh kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

1) Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data menggunakan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sering menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memastikan kebenaran informasi yang andal dan memperoleh gambaran yang lengkap tentang informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan wawancara bebas dan wawancara terstruktur secara bersamaan. Selain itu, peneliti dapat menggabungkan wawancara dengan observasi untuk memverifikasi kebenaran informasi. Penggunaan informan yang berbeda juga dilakukan untuk mengecek akurasi informasi. Dengan mengadopsi berbagai perspektif atau pandangan, diharapkan hasil penelitian dapat mendekati kebenaran yang lebih akurat.

2) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data melibatkan pengumpulan dan verifikasi kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data. Selain

wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber seperti observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan pribadi, dan gambar atau foto. Setiap metode dan sumber ini akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang pada gilirannya memberikan pandangan yang berbeda tentang fenomena yang diteliti. Kombinasi berbagai pandangan ini akan memperluas pengetahuan dan membantu memperoleh kebenaran yang lebih andal.

6. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data yang baik, kita dapat memahami situasi yang sedang terjadi dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya.

7. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, alur sebab-akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik diverifikasi dengan cara melihat dan memepertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang tepat. Hal ini dilakukan agar data yang didapat dan penafsiran terhadap data memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kuat.